PERAN AGAMA SEBAGAI MORAL PUBLIK TERHADAP GERAKAN ANTI-ROKOK DI BONE-BONE ENREKANG (Kajian Antropologi Agama)

Nur Ahsan Syakur

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ahsannor@gmail.com

Abstract

This study employs a descriptive qualitative approach based on field research to gain an in-depth understanding of the social, cultural, and religious contexts underlying the formation and implementation of the Smoke-Free Area (SFA) policy in Bone-Bone Village, Baraka District, Enrekang Regency, South Sulawesi. Bone-Bone Village exhibits unique and inspiring characteristics, as it has successfully implemented a collective smoking ban without formal legal coercion from the government, relying instead on local cultural approaches and the internalization of Islamic values. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, involving religious leaders, village officials, youth representatives, educators, and members of the general community. Data analysis was conducted using both inductive and deductive approaches to examine how religious values and local cultural norms are understood, internalized, and translated into collective behaviors that support social change. The findings indicate that the success of the smoke-free initiative in Bone-Bone is strongly influenced by the strategic roles of religious and community leaders. Islamic da'wah messages emphasizing the prohibition of actions that cause harm, combined with educational and public health values, serve as a moral foundation that strengthens the legitimacy of the anti-smoking policy. Furthermore, strong social norms, community solidarity, and collective pride in maintaining a healthy village identity contribute significantly to the sustainability of the policy. The SFA initiative in Bone-Bone represents a form of community-based social innovation and underscores the role of religion as a tangible and sustainable agent of social transformation.

Keywords: *Islamic Values; Smoke Free Area; Social Transformation.*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan untuk memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan dalam pembentukan serta pelaksanaan kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR) di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Desa Bone-Bone memiliki karakteristik unik dan inspiratif karena berhasil menerapkan larangan merokok secara kolektif tanpa paksaan hukum formal dari pemerintah, melainkan melalui pendekatan budaya lokal dan internalisasi nilai-nilai Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh agama, aparat desa, pemuda, tenaga pendidik, serta masyarakat umum. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif untuk menelaah bagaimana nilai keagamaan dan budaya lokal dipahami, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam perilaku kolektif masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KBAR di Bone-Bone sangat dipengaruhi oleh peran strategis tokoh agama dan

tokoh masyarakat. Pesan dakwah Islam tentang larangan perbuatan yang membawa kemudaratan, dipadukan dengan nilai pendidikan dan kesehatan, menjadi dasar moral yang memperkuat legitimasi kebijakan antirokok. Selain itu, norma sosial yang kuat, solidaritas komunitas, dan kebanggaan kolektif terhadap identitas desa sehat menopang keberlanjutan kebijakan ini. Inisiatif KBAR di Bone-Bone mencerminkan inovasi sosial berbasis komunitas serta menegaskan peran agama sebagai agen transformasi sosial yang berkelanjutan.
Kata Kunci: *Kawasan Bebas Asap Rokok; Nilai Islam; Transformasi Sosial.*

Pendahuluan

Rokok merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkelindan dengan konstruksi budaya, etika sosial, dan sistem nilai masyarakat. Dalam banyak komunitas, praktik merokok dilekatkan pada simbol maskulinitas, pergaulan, bahkan identitas kultural tertentu. Oleh karena itu, upaya pengendalian rokok tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan kesehatan, melainkan sebagai proses negosiasi nilai dan perubahan norma sosial dalam kehidupan Masyarakat.[1]

Berbagai kebijakan kawasan tanpa rokok yang diterapkan secara legal-formal menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa regulasi negara sering kali kurang efektif ketika berhadapan dengan praktik budaya yang telah mengakar dan tidak didukung oleh legitimasi moral di tingkat local.[2] Dalam konteks ini, pendekatan antropologis menjadi penting untuk memahami bagaimana norma sosial, otoritas simbolik, dan nilai-nilai kolektif bekerja dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Antropologi agama memandang agama bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber moral publik yang membentuk etika sosial, orientasi tindakan, dan mekanisme kontrol kolektif.[3] Agama memiliki kemampuan untuk mentransformasikan nilai normatif menjadi praktik sosial yang dianggap sah, bermakna, dan wajib ditaati. Sejumlah penelitian telah membahas peran agama dalam perubahan sosial, namun kajian yang secara spesifik menempatkan agama sebagai moral publik dalam pembentukan norma kesehatan berbasis komunitas masih relatif terbatas, terutama dalam konteks pedesaan Indonesia.[4]

Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, menghadirkan fenomena sosial yang menarik dalam perspektif antropologi. Sejak awal tahun 2000-an, masyarakat desa ini secara kolektif mendeklarasikan wilayahnya sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok tanpa tekanan hukum formal dari negara. Kebijakan tersebut tumbuh dari kesepakatan sosial yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan budaya lokal. Dalam praktiknya, larangan merokok tidak diposisikan sebagai aturan eksternal, melainkan sebagai bagian dari identitas moral dan tanggung jawab sosial warga desa.

---

[1]Mary Douglas, *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London: Routledge, 1966), h. 3-5.

[2]World Health Organization, *Ottawa Charter for Health Promotion* (Geneva: WHO, 1986), h. 1-4.

[3]Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973).

[4]Talal Asad, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993).

Penelitian terdahulu mengenai Desa Bone-Bone umumnya menempatkan desa ini sebagai contoh keberhasilan promosi kesehatan berbasis komunitas. Namun, sebagian besar kajian tersebut belum mengulas secara mendalam bagaimana proses internalisasi nilai keagamaan berlangsung, bagaimana otoritas tokoh agama membentuk legitimasi moral, serta bagaimana sanksi sosial non-formal bekerja sebagai mekanisme kontrol budaya. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan elemen penting dalam analisis antropologi agama dan perubahan sosial.

Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone sebagai ruang penerapan nilai moral dalam kehidupan masyarakat, di mana agama berfungsi sebagai dasar legitimasi sosial dan alat perubahan budaya. Studi ini menunjukkan bahwa norma kesehatan dapat diterapkan secara efektif ketika didukung oleh nilai-nilai agama dan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran agama sebagai moral publik dalam pembentukan dan penerapan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone, mengkaji mekanisme sosial dan kultural yang menopang kepatuhan dan ketaatan kolektif masyarakat, serta menjelaskan makna kebijakan tersebut dalam perspektif antropologi agama dan sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial dan prilaku budaya masyarakat Bone-Bone. Pemilihan Desa Bone-Bone, sebagai lokasi penelitian didasari keberhasilan masyarakatnya dalam menciptakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR) dengan nuasana sosial yang unik serta relevan dengan tujuan studi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan terukur dengan tokoh masyarakat, aparat desa, pemuka agama, guru, dan warga sebagai informan kunci guna menggali perspektif mereka terhadap nilai-nilai agama, norma sosial, serta motivasi kolektif dibalik kebijakan bebas rokok.

Para ulama, muballig, dan guru memperoleh prioritas utama sebagai informan dalam proses wawancara. Posisi dan peran mereka memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian ini tetap melibatkan tokoh masyarakat lainnya sebagai informan pendukung. Penentuan prioritas tersebut dilakukan untuk menggali secara mendalam dan komprehensif data yang berkaitan dengan status sosial para tokoh keagamaan di tengah masyarakat, serta peran strategis mereka dalam membentuk kesadaran kolektif dan menciptakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone.

Observasi dilakukan secara langsung dengan mencermati perilaku warga dalam kehidupan sehari hari, termasuk interaksi sosial di ruang publik, untuk melihat sejauh mana norma anti rokok diterapkan.[5] Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, arsip arsip desa, dan media kampanye lokal sebagai bukti pendukung analisis. Dengan Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena KBAR

[5]Bahtiar Effendy, *Agama Dan Perubahan Sosial: Perspektif Politik Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2017).

tidak hanya secara tekstual, tetapi juga melalui praktik sosial yang nyata dalam konteks budaya dan religius masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Kebijakan Bebas Rokok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR) di Desa Bone-Bone tidak lahir dari instruksi negara, melainkan dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap dampak sosial dan kesehatan akibat kebiasaan merokok. Kesadaran ini terutama dipicu oleh meningkatnya praktik merokok di kalangan remaja usia sekolah menengah, yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan tatanan moral desa. Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong munculnya inisiatif warga untuk membahas solusi secara partisipatif melalui forum-forum informal masyarakat.

Dalam perspektif antropologi, proses ini menunjukkan bagaimana sebuah komunitas membangun respons sosial melalui mekanisme internal yang berakar pada nilai dan pengalaman kolektif. Kebijakan awal KBAR di Bone-Bone diawali dengan deklarasi moral yang menegaskan bahwa merokok bukan bagian dari budaya lokal dan tidak selaras dengan identitas masyarakat yang religius dalam menjunjung nilai kesehatan. Deklarasi ini berfungsi sebagai penanda simbolik yang membedakan "praktik yang diterima" dan "praktik yang ditolak" dalam kehidupan sosial warga.[6]

Pendekatan berbasis deklarasi moral ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak selalu membutuhkan perangkat hukum yang ketat, melainkan legitimasi kultural yang disepakati bersama. Dalam hal ini, norma sosial bekerja lebih efektif dibandingkan regulasi formal karena dipatuhi sebagai kewajiban moral, bukan sekadar kepatuhan administratif.[7]

Peran Dakwah dan Pendidikan dalam Pembentukan Moral Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan aktivitas dakwah keagamaan menjadi dua pilar utama dalam menginternalisasi norma anti-rokok di Desa Bone-Bone. Di lingkungan sekolah, materi tentang bahaya rokok dan kesehatan reproduksi diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal melalui pendekatan edukatif yang kontekstual. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen moral yang menanamkan nilai tanggung jawab sosial kepada peserta didik sejak usia dini.

Di sisi lain, tokoh agama dan ulama memainkan peran strategis dalam mentransformasikan wacana kesehatan menjadi kewajiban religius. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan di masjid, mushalla, dan majelis taklim menempatkan merokok sebagai perbuatan mudarat yang bertentangan dengan prinsip menjaga amanah tubuh.

---

[6]Lestari Fitriana, 'Strategi Masyarakat Dalam Menolak Rokok: Studi Kasus Desa Bone-Bone', *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15.2 (2020), h. 77–90.

[7]Badan Litbangkes Kemenkes RI, *Laporan Nasional Riskesdas 2018*, 2018.



Gambar 1. Wawancara Informan
Sumber: Dokumentasi SKI CHANNEL, 2019

Para ustadz dan imam masjid menyisipkan pesan kesehatan dalam khotbah dan ceramah agama. Larangan merokok didekati dari perspektif agama sebagai bentuk perbuatan yang *mudharat*. Salah satu tokoh penting dan juga sebagai perintis kawasan anti asap rokok di desa Bone bone adalah Bapak Idris yang juga merupakan alumni IAIN Aluddin makassar. Dalam berbagai khutbah dan pengajian, Ustadz Idris kerap menekankan bahwa merokok adalah perbuatan yang mendatangkan mudarat, bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah swt.

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۛ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

> "*Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S Al Baqarah 195).*[8]

Peran Ustadz Idris sebagai tokoh sentral dalam gerakan ini menunjukkan pentingnya otoritas simbolik dalam antropologi agama. Melalui keteladanan personal dan konsistensi dakwah, nilai-nilai agama berhasil diterjemahkan menjadi praktik sosial konkret. Agama dalam konteks ini berfungsi sebagai, yaitu sistem nilai yang tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk etika sosial dan perilaku kolektif Masyarakat.[9]

[8]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

[9]Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973) .

Melalui pendekatan dakwah dan keteladanan personal, para mubalig mampu membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan larangan merokok sebagai bagian dari komitmen religius dan tanggung jawab sosial. Gagasan ini kemudian menginspirasi terbentuknya konsensus bersama dalam mendeklarasikan Desa Bone-Bone sebagai kawasan bebas asap rokok. Peran visioner Ustadz Idris menjadi kunci dalam mewujudkan misi dakwah yang menekankan ajaran agama sebagai landasan transformasi menuju tindakan konkret guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bermartabat.



Gambar 1. Wawancara Informan
Sumber: Dokumentasi SKI CHANNEL, 2019

Selain keterlibatan langsung tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan desa, pemanfaatan papan informasi larangan merokok juga dioptimalkan di seluruh wilayah dan fasilitas umum desa. Papan tersebut ditulis dalam bahasa lokal dan bahasa Indonesia, serta dilengkapi dengan ilustrasi yang menggambarkan bahaya merokok. Upaya ini bertujuan memberikan peringatan tidak langsung kepada para pendatang bahwa mereka sedang memasuki kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah bebas asap rokok.

Meskipun Desa Bone-Bone memiliki Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum formal, akan tetapi kepatuhan masyarakat justru lebih banyak ditopang oleh norma agama dan sanksi sosial. Teguran sopan terhadap pendatang yang merokok, larangan penjualan rokok di warung lokal, serta penerapan sanksi sosial edukatif menunjukkan bahwa kontrol sosial bekerja melalui mekanisme budaya yang hidup dan diterima oleh Masyarakat.[10]

Penerapan kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Terhadap pelanggar, diberlakukan sanksi sosial yang bersifat edukatif dan memberikan efek jera, berupa denda sebesar satu juta rupiah atau hukuman kerja sosial, seperti membersihkan fasilitas umum desa, termasuk masjid, balai desa, dan tempat publik lainnya.

Dampak Positif Implementasi KBAR

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penerapan KBAR telah menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Tidak ditemukan praktik merokok di

[10]World Health Organization, *Ottawa Charter for Health Promotion* (Geneva: WHO, 1986).

ruang publik desa, dan masyarakat—termasuk anak-anak dan remaja—menunjukkan keberanian untuk saling mengingatkan ketika terjadi pelanggaran norma. Proses ini menandakan keberhasilan internalisasi nilai anti-rokok secara kolektif, bukan melalui pengawasan eksternal, melainkan melalui kesadaran bersama.

Penurunan prevalensi perokok usia di bawah 18 tahun menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ini. Temuan wawancara dengan tenaga pendidik menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya memahami bahaya rokok, tetapi juga memosisikan diri sebagai penjaga identitas moral desa. Dalam perspektif antropologi budaya, kondisi ini mencerminkan terbentuknya habitus baru yang menempatkan hidup sehat sebagai bagian dari kehormatan sosial komunitas.[11]

Abdul Rahman**,** salah satu warga masyarakat memberikan komentarnya dalam mendukung implementasi aturan bebas rokok di desa Bone bone. Menurutnya dengan berlakunya aturan ini Masyarakat terutama anak remaja mulai sedikit demi sedikit menampakkan kesadarannya akan bahaya rokok bagi Kesehatan manusia.

> "*Sejak orang tua berhenti merokok, anak sekolah lebih sehat, fokus belajar meningkat, uang jajan cukup, lingkungan bersih, batuk berkurang, dan kami merasa aman mendukung masa depan mereka bersama warga desa*".[12]

Dampak lain yang dirasakan adalah terciptanya lingkungan desa yang bersih, bebas puntung rokok, dan memiliki kualitas udara yang lebih baik. Kohesi sosial masyarakat semakin menguat karena norma anti-rokok dipandang sebagai simbol kebanggaan kolektif. Keunikan ini menjadikan Desa Bone-Bone sebagai rujukan studi banding dan mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga sebagai praktik baik promosi kesehatan berbasis komunitas.

Menariknya, keberhasilan ini justru terjadi di wilayah pegunungan yang dikenal sebagai penghasil kopi, di mana budaya merokok biasanya melekat kuat. Fakta ini menegaskan bahwa nilai budaya tidak bersifat statis, melainkan dapat dinegosiasikan dan ditransformasikan ketika masyarakat memiliki landasan moral yang kuat. Dalam kerangka teori perubahan sosial, KBAR di Bone-Bone dapat dipahami sebagai bentuk inovasi akar rumput (grassroots innovation) yang tumbuh dari kesadaran internal komunitas.

Dengan demikian, kebijakan KBAR di Desa Bone-Bone tidak hanya merepresentasikan program kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan praktik internalisasi nilai-nilai keagamaan dan budaya kepatuhan terhadap otoritas religius yang berperan dalam pembentukan moral publik. Agama, pendidikan, dan norma lokal secara sinergis membangun sistem kontrol sosial yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi medium transformasi sosial masyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh kuatnya otoritas moral keagamaan yang dimiliki tokoh agama dalam kehidupan sosial desa, sehingga memperkaya kajian antropologi agama mengenai relasi antara nilai religius dan dinamika perubahan sosial.

---

[11]Fitriana, L. (2020). "Strategi Masyarakat dalam Menolak Rokok: Studi Kasus Desa Bone-Bone." *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15(2), 77–90.

[12]Wawancara dengan *A. Rahman* (Tokoh masyarakat), Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, 12 Oktober 2018.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR) di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, merupakan hasil dari berfungsinya agama sebagai moral publik yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan anti-rokok tidak lahir dari tekanan hukum formal, melainkan dari kesadaran kolektif yang dibangun melalui nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan budaya lokal. Agama berperan sebagai sumber legitimasi moral yang mentransformasikan isu kesehatan menjadi kewajiban etis dan religius, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap larangan merokok didorong oleh kesadaran moral bersama, bukan semata-mata oleh sanksi administratif.

Lebih jauh, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran strategis tokoh agama dan tokoh masyarakat, melalui dakwah, keteladanan personal, serta integrasi pesan kesehatan dalam ruang pendidikan dan keagamaan, menjadi kunci keberlanjutan kebijakan KBAR. Dari perspektif antropologi agama, praktik ini merepresentasikan inovasi sosial berbasis komunitas, di mana norma kesehatan dinegosiasikan dan dilembagakan sebagai bagian dari identitas moral masyarakat. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa kebijakan kesehatan masyarakat akan lebih efektif dan berkelanjutan apabila berakar pada nilai-nilai religius dan budaya lokal, sekaligus memperkaya kajian antropologi agama tentang relasi antara otoritas moral, norma sosial, dan transformasi sosial di masyarakat pedesaan Indonesia.

Daftar Pustaka

Asad, Talal, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993).

Badan Litbangkes Kemenkes RI, *Laporan Nasional Riskesdas 2018*, 2018.

Douglas, Mary, *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo* (London: Routledge, 1966).

Effendy, Bahtiar, *Agama Dan Perubahan Sosial: Perspektif Politik Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2017).

Fitriana, Lestari, 'Strategi Masyarakat Dalam Menolak Rokok: Studi Kasus Desa Bone-Bone', *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15 (2020).

Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973).

Hasnawati, 'Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Perilaku Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Sosiologi Agama*, 14 (2021).

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

Organization, World Health, *Ottawa Charter for Health Promotion* (Geneva: WHO, 1986).

Rahman, Abdul, 'Agama Sebagai Kontrol Sosial Dalam Masyarakat Pedesaan', *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41 (2020).

SKI Channel. (2022). *Kunjungan ke Desa Bone-Bone* [Video]. YouTube.